

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Achmad. *Menguak Tabir Hukum*. (Jakarta: Toko Gunung Agung, 2002).
- Asshidiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara*. (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2009).
- Azra, Azumardi. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Mandiri*. (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Bangun, Zakaria. *Demokrasi dan Kehidupan Demokrasi di Indonesia*. (Medan: Bina Media Perintis, 2008).
- Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009).
- Fuady, Munir. *Konsep Negara Demokrasi*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2010).
- Handoyo, B. Hestu Cipto. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009).
- Hoesein, Zainal Arifin. *Judicial Review di Mahkamah Agung Republik Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2009).
- Huda, Ni'matul. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2005).
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. (Bandung: LPPM Unisba, 1995).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).
- \_\_\_\_\_. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo. *Penemuan Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993).
- Rahardiansah, Trubus. *Pengantar Ilmu Politik*. (Jakarta: Universitas Trisakti, 2014).

- Siahaan, Maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Konstitusi Press, 2005).
- Sirajuddin dan Winardi. *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*. (Malang: Setara Press, 2015).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).
- Soemantri, Sri. *Hak Menguji Materil Di Indonesia*. (Bandung: Alumni, 1997).
- \_\_\_\_\_. *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014).
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007).
- Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intirasi Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999).
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2010).

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

- Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1985)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4317)*.
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4958)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5076)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226)*.

\_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)*.

### **C. Jurnal**

Achmad, Mulyanto. "Problematika Pengujian Peraturan Perundang-undangan (*Judicial Review*) Pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Yustisia*, Volume 2, Nomor 1, Januari-April 2013.

Arrsha, Ria Casmi. "Pemilu Serentak dan Masa Depan Konsolidasi Demokrasi". *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 3, September 2014.

Faridhi, Adrian. "Pengujian Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan", *Jurnal Mercatoria*, Volume 10, Nomor 2, Desember 2017.

Huda, Ni'Matul. "Urgensi Judicial Review Dalam Tata Hukum Indonesia". *Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Januari 2008.

Irawan, Benny Bambang. "Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia". *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2017.

Kurniawan, Gadug. "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi". *Jurnal Inovatif*, Volume 8, Nomor 1, Januari 2015.

Pasaribu, Parlindungan. "Kedudukan dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, Agustus 2010.

Purnama, Eddy. "Lembaga Perwakilan dan *Check and Balances* Dalam Kekuasaan Negara". Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 63, Tahun 16, Agustus 2014.

Sitabuana, Tunjung Herming. "Penyelesaian Masalah Diskriminasi Terhadap Etnis Cina (Studi Tentang Perkembangan Politik Hukum di Bidang Kewarganegaraan Republik Indonesia), Ringkasan Disertasi Doktor. Universitas Diponegoro, 2011.

Sulardi dan Yohana Puspita Wardoyo. "Kepastian Hukum, Kemanfaat, dan Keadilan Terhadap Perkara Pidana Anak". Jurnal Yudisial, Volume 8, Nomor 3, Desember 2015.

#### **D. Internet**

Afif Khalid. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia".  
<https://media.neliti.com/media/publications/225122-penafsiran-hukum-oleh-hakim-dalam-sistem-f0c52582.pdf>.

Anis Azizah. "Sistem Pemilihan Umum".  
<https://www.kompasiana.com/anisazizah96/59a753fb159344519b0ea182/sistem-pemilihan-umum>.

Hardyanto. "*Judicial Review* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) oleh Mahkamah Konstitusi".  
<http://e-journal.uajy.ac.id/6949/1/JURNAL.pdf>.

Ihsan Adzillah. "Tinjauan Teoritis tentang Negara Hukum, Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Tata Usaha Negara dan Izin Mendirikan Bangunan". <http://repository.unpas.ac.id/15370/3/BAB%20II.pdf>.

Irman. "Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Rangka Kontrol Terhadap Kekuatan Politik Dewan Perwakilan Rakyat".  
<https://media.neliti.com/media/publications/235477-pengujian-undang-undang-oleh-mahkamah-ko-a47e9dbc.pdf>.

Pan Mohamad Faiz. "Serangkut Syarat Calon Anggota DPD".  
<https://panmohamadfaiz.com/2019/01/10/sengkarut-syarat-calon-anggota-dpd/>.

Riana Kesuma Ayu. "*Judicial Review* (3)".  
<http://www.websiteayu.com/judicial-review-3/>.

R. Yosia Simamora. “Penafsiran Hakim Tentang Keberadaan Struktural Lembaga Kepolisian Sebagai Penyelenggara Negara dan Penegak Hukum (Kajian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomorm04/PID.PRAP/2015)”.  
<https://media.neliti.com/media/publications/114867-ID-penafsiran-hakim-tentang-keberadaan-stru.pdf>.

Stevanus Evan Setio. “Fungsi Legislasi DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”.  
<https://media.neliti.com/media/publications/44210-ID-fungsi-legislasi-dpd-dalam-sistem-ketatanegaraan-indonesia.pdf>.

## **E. Putusan**

Indonesia. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018*.

\_\_\_\_\_. *Putusan Mahkamah Agung Nomor 65P/HUM/2018*.